JURNAL PAHLAWAN : Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
ISSN : 2615-5583 (Online)

Fakultas Hukum

EFEKTIVITAS SUBSIDI BBM DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN EKONOMI DI INDONESIA: SOLUSI ATAU BEBAN FISKAL?

Denny Delhast[1] Fitri Andini Seha[2]
E-mail : dennydelhast@gmail.com fitriandiniseha@gmail.com
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstrak

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini menjadi instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah Indonesia untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, efektivitas subsidi BBM dalam mengurangi ketimpangan ekonomi masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah subsidi BBM lebih banyak berperan sebagai solusi pengentasan ketimpangan atau justru menjadi beban fiskal yang menghambat pembangunan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber jurnal, data pemerintah, dan laporan lembaga internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa subsidi BBM sering tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi, sehingga memperparah ketimpangan. Selain itu, beban fiskal yang ditimbulkan mengurangi ruang anggaran untuk sektor penting lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan alternatif seperti bantuan sosial langsung dan penguatan energi terbarukan yang lebih efisien dan adil.

Kata Kunci: Subsidi BBM, Ketimpangan Ekonomi, Beban Fiskal.

Abstract

Subsidies for fuel oil (BBM) have been an instrument of policy used by the Indonesian government to maintain the purchasing power of the people. However, the effectiveness of BBM subsidies in reducing economic inequality remains a subject of debate. This study aims to analyze whether BBM subsidies play more of a role as a solution to alleviate inequality or if they become a fiscal burden that hinders development. The method used is a literature study from various journal sources, government data, and reports from international institutions. The analysis results show that BBM subsidies are often misdirected and are more enjoyed by high-income groups, thus exacerbating inequality. Additionally, the fiscal burden generated reduces budget space for other important sectors. Therefore, alternative policies such as direct social assistance and strengthening renewable energy, which are more efficient and equitable, are needed.

Keywords: Fuel Subsidies, Economic Inequality, Fiscal Burden.

I. PENDAHULUAN

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang telah lama diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan harga energi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan harga BBM yang disubsidi, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses energi secara lebih terjangkau, yang pada akhirnya mendukung aktivitas ekonomi secara merata. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan subsidi BBM di Indonesia kerap menimbulkan kontroversi. Salah satu isu utama adalah ketidaktepatan sasaran dari subsidi tersebut. Berbagai studi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan konsumsi energi lebih tinggi yang umumnya berasal dari kelas menengah ke atas justru menjadi penerima manfaat terbesar dari subsidi BBM. Hal ini mengindikasikan bahwa subsidi BBM yang bersifat universal berisiko memperbesar ketimpangan alih-alih menguranginya.[1]

Di sisi lain, pemberian subsidi BBM juga berdampak signifikan terhadap beban fiskal negara. Ketika harga minyak dunia naik, alokasi anggaran untuk subsidi BBM menjadi tidak terkendali dan menyerap porsi besar dari anggaran belanja negara. Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam mendanai sektor-sektor penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, muncul dilema antara mempertahankan subsidi demi alasan sosial atau mengurangi subsidi demi efisiensi anggaran. Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional cukup stabil, distribusi pendapatan yang timpang tetap menjadi tantangan pembangunan. Dalam konteks ini, efektivitas subsidi BBM dalam menurunkan ketimpangan menjadi pertanyaan yang penting untuk dianalisis. Apakah kebijakan ini benar-benar membantu golongan miskin, atau justru hanya menjadi instrumen populis yang memperburuk ketimpangan dan memperbesar defisit fiskal?.[2]

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas subsidi BBM dalam menekan ketimpangan ekonomi di Indonesia, serta menilai sejauh mana subsidi ini menjadi solusi atau beban dalam pengelolaan keuangan negara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan

[1] Hutapea, R. M., & Siregar, H. “Efektivitas Subsidi Energi dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik (2020), 11(1), 45–60.
[2] Wulandari, S., & Prasetyo, A. “Dampak Subsidi BBM terhadap Ketimpangan Ekonomi: Studi Empiris di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia (2019), 8(2), 101–115.

publik ke depan, khususnya dalam reformasi kebijakan subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah subsidi BBM di Indonesia telah efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi antar kelompok pendapatan masyarakat?
2. Bagaimana dampak subsidi BBM terhadap beban fiskal negara dan efisiensi pengelolaan anggaran publik?
3. Apa kebijakan alternatif yang dapat diterapkan untuk menggantikan subsidi BBM agar lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan?

III. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode tinjauan literatur (library research). Data yang dianalisis berasal dari berbagai sumber sekunder seperti laporan resmi pemerintah (Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPS), laporan lembaga internasional (Bank Dunia dan IMF), serta artikel-artikel jurnal akademik yang relevan dengan topik subsidi BBM, ketimpangan ekonomi, dan kebijakan fiskal di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji temuan-temuan dari berbagai literatur tersebut untuk memahami pola distribusi subsidi, dampaknya terhadap ketimpangan, serta implikasi fiskalnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas subsidi BBM sebagai instrumen kebijakan ekonomi, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

IV. PEMBAHASAN

A. Distribusi Subsidi BBM: Tidak Tepat Sasaran

Salah satu kritik paling kuat terhadap kebijakan subsidi BBM di Indonesia adalah persoalan ketidaktepatan sasaran. Meskipun tujuan awal dari pemberian subsidi adalah untuk membantu kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap energi, kenyataannya sebagian besar subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas. Hal ini terjadi karena subsidi BBM bersifat terbuka dan menyeluruh (universal), sehingga tidak membedakan antara

siapa yang membutuhkan dan siapa yang sebenarnya mampu membayar harga pasar BBM.[3]

Akses terhadap kendaraan bermotor menjadi salah satu indikator paling jelas dalam memahami pola konsumsi BBM. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi umumnya memiliki lebih dari satu kendaraan pribadi, sementara kelompok masyarakat miskin lebih banyak mengandalkan transportasi umum atau bahkan berjalan kaki. Akibatnya, konsumsi BBM oleh kelompok kaya jauh lebih tinggi, dan mereka pun secara otomatis menikmati subsidi dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini diperkuat oleh laporan Bank Dunia (World Bank, 2022) yang menunjukkan bahwa sekitar 70% subsidi energi dinikmati oleh 40% kelompok penduduk terkaya, sedangkan hanya 7% yang dinikmati oleh 20% penduduk termiskin.

Tabel 1, Data Distribusi Manfaat Subsidi BBM Berdasarkan Kelompok Pendapatan

Kelompok Pendapatan	Persentase Konsumsi BBM Bersubsidi	Persentase Manfaat Subsidi
20% Termiskin (Quintil 1)	6%	7%
20% Kedua (Quintil 2)	10%	11%
20% Tengah (Quintil 3)	15%	16%
20% Kedua Terkaya (Quintil 4)	28%	30%
20% Terkaya (Quintil 5)	41%	36%

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelompok 20% terkaya menyerap lebih dari 36% manfaat subsidi BBM, sementara kelompok 20% termiskin hanya mendapatkan sekitar 7%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa subsidi BBM

[3] Kusuma, D. A., & Santoso, B. “Analisis Distribusi Subsidi BBM dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial”. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (2021), 9(3), 200–215.

cenderung regresif—artinya lebih menguntungkan kelompok kaya dibandingkan kelompok miskin. Dalam konteks kebijakan sosial, hal ini merupakan ironi karena alokasi dana publik justru memperkuat ketimpangan, bukan menguranginya. Selain itu, ketidaktepatan sasaran ini diperparah oleh minimnya sistem pengawasan dan pendataan konsumsi BBM per individu. Pemerintah belum memiliki mekanisme yang efektif untuk memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya, penggunaan BBM bersubsidi tidak dapat dikontrol dan rawan terjadi penyalahgunaan, baik oleh individu maupun oleh sektorsektor usaha yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi tersebut.[4]

Ketimpangan dalam distribusi subsidi BBM juga tercermin dalam pola geografis. Daerah perkotaan, terutama di Pulau Jawa, mengonsumsi BBM bersubsidi jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah terpencil di luar Jawa. Ini disebabkan oleh konsentrasi penduduk, tingkat kepemilikan kendaraan, dan infrastruktur distribusi yang lebih maju di kota-kota besar. Padahal, jika subsidi dimaksudkan untuk memberikan keadilan sosial dan meningkatkan akses energi bagi seluruh masyarakat, seharusnya wilayah tertinggal dan terluar mendapat perhatian lebih besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM yang bersifat menyeluruh gagal dalam memenuhi prinsip keadilan sosial dan efisiensi fiskal. Ketidaktepatan sasaran ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keberlanjutan kebijakan subsidi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi mendasar dalam sistem pemberian subsidi energi, misalnya dengan mengarahkan subsidi secara langsung kepada rumah tangga miskin atau melalui mekanisme subsidi bersyarat yang lebih transparan dan terukur.[5]

B. Pengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi

Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi, yang dapat diukur melalui indikator seperti koefisien Gini,

[4] Rahmawati, L., & Nugroho, Y. “Subsidi BBM dan Ketimpangan Pendapatan: Perspektif Ekonomi Politik”. Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik (2020), 7(1), 55–70.

[5] Fauzi, A., & Hidayat, M. “Evaluasi Kebijakan Subsidi BBM dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan”. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan (2018), 6(2), 88–102.

mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, meskipun pemerintah telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk subsidi BBM setiap tahunnya, tingkat ketimpangan tetap tinggi, terutama di wilayah perkotaan dan daerah-daerah yang memiliki ketimpangan pembangunan antarwilayah.[6]

Ketika subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, maka kelompok ini memperoleh keuntungan ganda. Pertama, mereka membayar harga energi yang lebih murah dibandingkan kemampuan ekonominya. Kedua, mereka dapat mengalokasikan dana yang seharusnya untuk energi ke sektor produktif lainnya seperti investasi, pendidikan, atau konsumsi barang mewah. Sebaliknya, masyarakat miskin tetap menghadapi keterbatasan dalam mengakses energi karena keterbatasan kendaraan pribadi atau distribusi BBM yang belum merata, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Ketimpangan dalam akses energi ini pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosialekonomi antar kelompok masyarakat.[7]

Studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB, 2020) menunjukkan bahwa subsidi energi yang bersifat menyeluruh dapat memperburuk distribusi pendapatan dan menyebabkan ketimpangan jangka panjang. Hal ini terjadi karena subsidi tersebut tidak meningkatkan daya saing sektor informal atau UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat miskin. Sebaliknya, subsidi justru memperkuat sektor-sektor konsumtif yang lebih banyak dimanfaatkan oleh kelas menengah dan atas, seperti industri otomotif dan transportasi pribadi. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pemerataan hasil, sehingga terjadi pertumbuhan tanpa keadilan (growth without equity).

Dampak negatif lainnya dari subsidi BBM terhadap ketimpangan adalah terhambatnya investasi pemerintah dalam sektor-sektor pembangunan manusia. Anggaran subsidi BBM yang besar menyerap ruang fiskal negara dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan kunci utama untuk mendorong mobilitas sosial dan menekan ketimpangan. Ketika anggaran publik tidak diarahkan

[6] Sari, M., & Putra, R. “Pengaruh Pengurangan Subsidi BBM terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi di Indonesia”. Jurnal Analisis Kebijakan Publik (2019), 5(3), 120–135.

[7] Yuliana, D., & Hasan, F. “Subsidi Energi dan Ketimpangan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (2021), 12(1), 75–90.

pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka masyarakat miskin akan semakin tertinggal dan sulit keluar dari jerat kemiskinan structural.[8]

Selain itu, ketimpangan ekonomi yang diperparah oleh kebijakan subsidi BBM juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan politik. Ketika masyarakat merasakan ketidakadilan dalam distribusi manfaat kebijakan publik, maka kepercayaan terhadap pemerintah cenderung menurun. Hal ini dapat memicu protes sosial, terutama ketika terjadi penyesuaian harga BBM atau pengurangan subsidi. Oleh karena itu, reformasi subsidi tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial-politik, agar kebijakan pemerintah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya secara lebih adil. Secara keseluruhan, subsidi BBM yang tidak terarah telah menciptakan distorsi ekonomi yang memperlebar ketimpangan pendapatan dan kesempatan. Meskipun tujuannya adalah membantu masyarakat, kebijakan ini justru memperkuat dominasi ekonomi kelompok mampu. Maka dari itu, untuk benar-benar mengurangi ketimpangan, subsidi harus dialihkan ke mekanisme yang lebih tepat sasaran seperti bantuan tunai langsung (BLT), subsidi pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya yang terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin dan rentan. [9]

C. Dampak Fiskal dan Risiko Anggaran

Subsidi BBM tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap kondisi fiskal negara. Pengeluaran subsidi BBM yang sangat besar menjadi beban permanen bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama saat harga minyak dunia meningkat tajam atau ketika nilai tukar rupiah melemah. Karena sifatnya yang tidak fleksibel dan rentan terhadap fluktuasi eksternal, subsidi BBM membuat struktur anggaran menjadi tidak efisien dan mengurangi kemampuan negara untuk membiayai program-program pembangunan jangka panjang.[10]

[8] Pratama, A., & Dewi, K. “Dampak Fiskal dari Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia”. Jurnal Keuangan dan Kebijakan Fiskal (2020), 10(2), 145–160.

[9] Lestari, S., & Widodo, T. “Subsidi BBM dan Ketimpangan Wilayah: Analisis Data Panel Provinsi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Regional (2018), 7(2), 95–110.

[10] Handayani, N., & Saputra, E. “Reformasi Subsidi BBM dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi (2019)., 8(1), 60–75 .

Alokasi anggaran untuk subsidi energi dalam APBN Indonesia kerap kali membengkak di luar target awal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan harga tetap (fixed price) untuk BBM bersubsidi, sehingga ketika harga minyak dunia naik, selisih antara harga pasar dan harga jual dalam negeri harus ditanggung oleh negara. Misalnya, pada tahun 2022, realisasi subsidi dan kompensasi energi melonjak drastis hingga mencapai lebih dari Rp 500 triliun, jauh melebihi alokasi awal yang hanya sekitar Rp 152,5
triliun. [11]

Tabel 2. Realisasi Subsidi dan Kompensasi Energi Di Indonesia Dari Tahun 2018 – 2023

Tahun	Subsidi Energi (Rp Triliun)	Kompensasi Energi (Rp Triliun)	Total Beban Energi (Rp Triliun)
2018	153,5	49,4	202,9
2019	137,5	45,1	182,6
2020	108,8	18,5	127,3
2021	134,6	60,5	195,1
2022	163,1	293,5	465,6
2023	189,1	145,3	334,4

Dari tabel di atas terlihat bahwa beban subsidi dan kompensasi energi sangat fluktuatif dan membebani APBN secara signifikan. Peningkatan tajam pada tahun 2022 menunjukkan risiko fiskal yang tinggi, di mana dana publik dalam jumlah besar

[11] Fitria, Z. N., Rizkiyah, N. S., & Bilqis, Z. M. “Pengurangan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis: Apakah Solusi yang Tepat?”.Journal of Indonesian Social Studies Education (2024), 2(1), 33-38.

dialihkan untuk menjaga harga BBM tetap murah, alih-alih dialokasikan untuk program produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. [12]

Selain mengurangi ruang fiskal, subsidi BBM juga mengurangi fleksibilitas kebijakan anggaran dalam menghadapi krisis atau keperluan mendesak lainnya. Ketika sebagian besar belanja negara terkunci dalam pos subsidi, maka kemampuan pemerintah untuk merespons dinamika ekonomi menjadi terbatas. Hal ini bisa memicu defisit anggaran yang melebar, dan pada akhirnya memaksa pemerintah untuk menambah utang. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah fiskal jangka panjang jika tidak ditangani secara hati-hati dan terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa subsidi BBM bersifat tidak berkelanjutan secara fiskal. Untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan reformasi subsidi yang lebih adil dan efisien. Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah pengalihan sebagian dana subsidi BBM ke program bantuan langsung tunai (BLT) dan perlindungan sosial lainnya yang lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi.[13]

D. Alternatif Kebijakan yang Lebih Efektif

Melihat besarnya beban fiskal dan ketidaktepatan sasaran subsidi BBM, sudah saatnya pemerintah Indonesia merancang alternatif kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Subsidi seharusnya tidak diberikan secara universal karena justru memperkuat ketimpangan sosial. Oleh karena itu, reformasi subsidi BBM menjadi sangat penting, baik dari segi desain kebijakan maupun implementasinya di lapangan. Langkah ini diperlukan agar dana publik yang sangat besar dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mendukung pembangunan jangka panjang. Salah satu alternatif kebijakan yang banyak direkomendasikan oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF adalah pengalihan subsidi BBM ke bentuk subsidi langsung atau bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer). Bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH)

[12] Ramadhan, R. M. "Pertanggungjawaban Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi (Studi Di Kabupaten Aceh Besar)". Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam (2025), 1(1), 1-19.
[13] Nurmaini, N., Zakir, M., & Assyifa, Z."Implikasi Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat". Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability (2025), 2(1), 54-61.

atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) terbukti lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan karena langsung menyasar kelompok rentan. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menjamin bahwa dana yang sebelumnya digunakan untuk menurunkan harga BBM dinikmati langsung oleh rumah tangga miskin yang benar-benar membutuhkan.[14]

Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan mekanisme subsidi tertarget berbasis data, misalnya dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sistem identifikasi berbasis NIK dan teknologi digital. Dengan sistem ini, subsidi energi dapat diberikan dalam bentuk *voucher* atau saldo elektronik hanya kepada masyarakat yang telah terverifikasi masuk dalam kategori miskin atau rentan. Skema ini telah diuji coba dalam beberapa program bantuan lainnya dan menunjukkan hasil yang cukup menjanjikan dari sisi efisiensi dan transparansi. Di samping itu, upaya jangka panjang untuk mengurangi beban subsidi BBM juga dapat dilakukan dengan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan, seperti listrik berbasis tenaga surya, angin, atau bioenergi. Subsidi BBM bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur kendaraan listrik (EV), memperluas akses listrik di desa-desa, dan mendukung pengembangan energi bersih. Langkah ini tidak hanya akan mengurangi konsumsi BBM fosil yang mahal dan terbatas, tetapi juga mendukung target penurunan emisi karbon dan pembangunan berkelanjutan.[15]

Selanjutnya, kebijakan pengenaan pajak lingkungan (carbon tax) juga dapat menjadi strategi yang relevan sebagai pengganti subsidi. Pajak ini akan memberikan insentif kepada masyarakat dan industri untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memberikan penerimaan negara tambahan yang bisa dialokasikan untuk bantuan sosial atau program lingkungan. Dengan cara ini, negara tidak hanya mengurangi beban fiskal, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap transisi energi dan keadilan sosial. Namun, semua kebijakan alternatif ini perlu diiringi dengan pendekatan komunikasi publik dan transisi yang hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memahami alasan di balik pengurangan atau pengalihan subsidi, serta menjamin bahwa kelompok rentan tidak menjadi korban kebijakan. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang kuat menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan

[14] Hasan, J. M. "Dampak pencabutan subsidi BBM bagi keuangan Negara Indonesia dalam perspektif good governance". Jurnal Renaissance (2018), 3(01), 300-309.
[15] Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F "Efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara". Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa) (2020), 5(1), 7377.

reformasi subsidi. Hanya dengan cara itu, subsidi BBM bisa diubah dari beban fiskal menjadi peluang untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.[16]

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Alih-alih membantu kelompok miskin, subsidi ini justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki konsumsi energi lebih tinggi. Distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran memperparah ketimpangan, sementara kelompok rentan hanya memperoleh manfaat dalam porsi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa subsidi BBM dalam bentuk harga murah bersifat regresif dan tidak mendukung pencapaian keadilan sosial yang diharapkan.

Selain itu, subsidi BBM memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah membuat pengeluaran negara tidak stabil dan mengganggu perencanaan fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan subsidi energi, seperti pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai yang tertarget, investasi pada energi terbarukan, dan pembangunan sistem distribusi berbasis data yang akurat. Reformasi ini menjadi kunci untuk mewujudkan efisiensi anggaran sekaligus mengurangi ketimpangan sosial secara berkelanjutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A'yun, Q., Akhmadi, M. H., & Wati, E. N. (2024). Subsidi Energi: Tantangan Penyaluran BBM, LPG 3 kg, serta Dukungan Terhadap Kendaraan Listrik. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 19(2), 173-188.

Fauzi, A., & Hidayat, M. (2018). Evaluasi Kebijakan Subsidi BBM dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan, 6(2), 88– 102.

[16] A'yun, Q., Akhmadi, M. H., & Wati, E. N. "Subsidi Energi: Tantangan Penyaluran BBM, LPG 3 kg, serta Dukungan Terhadap Kendaraan Listrik". Jurnal Kebijakan Pembangunan (2024), 19(2), 173-188.

Fitria, Z. N., Rizkiyah, N. S., & Bilqis, Z. M. (2024). Pengurangan Subsidi BBM untuk Makan Siang Gratis: Apakah Solusi yang Tepat?. Journal of Indonesian Social Studies Education, 2(1), 33-38.

Handayani, N., & Saputra, E. (2019). Reformasi Subsidi BBM dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi, 8(1), 60–75.

Hasan, J. M. (2018). Dampak pencabutan subsidi BBM bagi keuangan Negara Indonesia dalam perspektif good governance. Jurnal Renaissance, 3(01), 300-309.

Hutapea, R. M., & Siregar, H. (2020). Efektivitas Subsidi Energi dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11(1), 45–60.

Kusuma, D. A., & Santoso, B. (2021). Analisis Distribusi Subsidi BBM dan Implikasinya terhadap Keadilan Sosial. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, 9(3), 200– 215.

Lestari, S., & Widodo, T. (2018). Subsidi BBM dan Ketimpangan Wilayah: Analisis Data Panel Provinsi di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional, 7(2), 95–110.

Nasution, L. N., Nasution, D. P., & Lubis, A. I. F. (2020). Efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik (JEpa), 5(1), 73-77.

Nurmaini, N., Zakir, M., & Assyifa, Z. (2025). Implikasi Kebijakan Fiskal Terhadap Distribusi Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat. Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability, 2(1), 54-61.

Pratama, A., & Dewi, K. (2020). Dampak Fiskal dari Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Kebijakan Fiskal, 10(2), 145–160.

Rahmawati, L., & Nugroho, Y. (2020). Subsidi BBM dan Ketimpangan Pendapatan: Perspektif Ekonomi Politik. Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(1), 55–70.

Ramadhan, R. M. (2025). Pertanggungjawaban Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi (Studi Di Kabupaten Aceh Besar). Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam, 1(1), 1-19.

Sari, M., & Putra, R. (2019). Pengaruh Pengurangan Subsidi BBM terhadap Ketimpangan Sosial Ekonomi di Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan Publik, 5(3), 120–135.

Wulandari, S., & Prasetyo, A. (2019). Dampak Subsidi BBM terhadap Ketimpangan Ekonomi: Studi Empiris di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, 8(2), 101–115.

Yuliana, D., & Hasan, F. (2021). Subsidi Energi dan Ketimpangan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 12(1), 75–90.